

PEMBANGUNAN SUDAH MELEBIHI TAMBAHAN WAKTU

## Legislator Minta BPK Audit Dinas Pendidikan

**CIBINONG (IM)**- Diduga sudah melebihi tambahan waktu 50 hari, proyek pembangunan ruang kelas SMPN 2 Cibinong masih dikerjakan oleh penyedia jasa PT Putra Menara Pratama. Padahal, di awal Bulan Januari tahun ini. Komisi III DPRD Kabupaten Bogor melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke lokasi pembangunan ruang kelas SMPN 2 Cibinong, meminta penyedia jasa maupun konsultan pengawas untuk menuntaskan proyek senilai Rp2,7 miliar itu.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Fahrurizal mengaku geram akan molonya proyek pembangunan ruang kelas SMPN 2 Cibinong hingga melebihi tambahan waktu 50 hari, yang diberikan Dinas Pendidikan sejak akhir Tahun 2022. "Sudah diberikan tambahan waktu 50 hari, prroyek pembangunan ruang kelas di SMPN 2 Cibinong masih dikerjakan oleh PT Putra Menara Pratama. Segera, kami akan memanggil Dinas Pendidikan," ujar Fahrurizal kepada wartawan, Rabu (22/2).

Fahrurizal menuturkan, para legislator akan meminta

Dinas Pendidikan bersikap tegas, dengan tidak hanya memberikan sanksi denda 1/1000 x nilai proyek perhari, tetapi juga memblacklist PT Putra Menara Pratama. "Pemberian sanksi denda itu sudah pasti, PT Putra Menara Pratama saya minta diputus kontrak dan diblacklist dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jangan sampai, sudah waktu pekerjaannya molor, kualitas pekerjaannya juga tidak baik," tutur Rizal sapaan akrabnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menduga, Dinas Pendidikan lalai dalam perencanaan, sementara Kantor Pengadaan Barang Jasa kurang teliti dalam menentukan pemenang lelang proyek tersebut. "Molonya proyek pembangunan ruang kelas di SMPN 2 Cibinong ini sebuah kerugian bagi pihak sekolah, hingga tidak maksimal dalam kegiatan belajar mengajar (KBM). Kamu akan mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kantor Pengadaan Barang Jasa," tegasnya. ● **gio**

## Perkuat Kesehatan, Pemkab Bogor Tekan Angka Stunting

**BOGOR (IM)**- Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengajak kepala Puskesmas se-Kabupaten Bogor untuk sinergi melakukan penguatan sektor kesehatan dengan sistem terintegrasi. Hal ini dimaksudkan, untuk mengoptimalkan penanganan dan penurunan angka stunting serta mendorong terciptanya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bogor.

Hal ini disampaikan, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bogor dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan primer dan kinerja puskesmas, Lido Lake Resort Cigombong, Selasa (21/2).

Iwan Setiawan menerangkan bahwa peran Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Salah satunya melalui pelayanan kesehatan yang optimal dan terintegrasi. "Prioritas kita hari ini adalah bagaimana penguatan sektor kesehatan, mulai dari layanan, pengelolaan hingga penanganannya salah satunya penanganan stunting," ungkap Iwan Setiawan.

Menurut Iwan Setiawan bahwa melalui sistem terintegrasi penanganan dan penurunan stunting bisa dilakukan lebih mudah.

"Makanya harus terintegrasi, saya minta semua Kepala Puskesmas bekerja berdasarkan satu data yang terintegrasi. Data itu akan jadi rujukan yang mudah dibaca, mudah dipelajari dan dalam pelaksanaannya akan gampang dan sarasannya juga lebih jelas," terang Plt Bupati Bogor.

Ia juga meminta penanganan stunting dilakukan secara terpadu dengan semua pihak termasuk masyarakat. Iwan Setiawan juga menyatakan akan mengaktifkan kembali Posyandu Terpadu di setiap kecamatan.

"Penanganan stunting harus dilakukan keroyokan oleh semua stakeholder. Kami ingin ada posyandu rujukan yang besar di setiap kecamatan. Juga terdapat posyandu terintegrasi di setiap desa, serta meningkatkan fasilitas puskesmas dengan layanan Poned," pungkasnya. ● **gio**

## Iwapi Kab. Bogor Berkomitmen Lahirkan Pengusaha Perempuan Berdaya Saing



Potong tumpeng, Peringatan HUT IWAPI ke 48.

**BOGOR (IM)**- Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus melahirkan pengusaha perempuan Kabupaten Bogor yang unggul dan berdaya saing. Selain itu, IWAPI aktif menyukseskan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023.

Hal itu disampaikan Ketua DPC Iwapi Kabupaten Bogor, Hj. Inne Roswianita saat menghadiri peringatan HUT IWAPI ke-48 di Rizen Premiere Hotel Cisarua, Selasa (21/2). Lebih lanjut Inne Roswianita mengatakan bahwa, usia ke 48 dimaknai dengan eksistensi organisasi IWAPI yang semakin dewasa, matang dan mandiri dalam berprestasi. Tentunya diisi dengan kreativitas dan inovasi, untuk melahirkan pengusaha perempuan yang unggul dan berdaya saing khusus di Kabupaten Bogor.

Ia menambahkan, kondisi ini sudah sepatutnya kita syukuri, agar terus berkarya demi kesejahteraan bersama. Momentum ini tentunya jadi sarana bagi kami untuk terus berperan aktif di berbagai sektor salah satunya menyukseskan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023, jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IWAPI, Nita Yudhi menyatakan, apresiasi kepada IWAPI Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Hj. Inne Roswianita, yang terus melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan. Harapannya di HUT IWAPI yang ke-48 terus berujung sehingga perempuan khususnya di Kabupaten Bogor umumnya di Indonesia

dalam menciptakan regenerasi perempuan yang lebih potensi dan hidup lebih baik.

Di usia 48 tahun ini, kami berharap bisa terus kompak dalam mendorong kemajuan dan peningkatan perekonomian perempuan Kabupaten Bogor. Serta menciptakan perempuan inovatif, kreatif dan kolaboratif. IWAPI Kabupaten Bogor ini sangat luar biasa, terus pertahankan kinerja yang sudah baik, tegas Nita.

Sementara itu, WKU I DPD IWAPI Jabar, Rahayu Rizka menjelaskan bahwa, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), merupakan wadah bagi perempuan pengusaha di Indonesia dengan misi menjadikan perempuan Indonesia mandiri secara ekonomi dan visi menjadikan IWAPI sebagai organisasi perempuan pengusaha terbaik dan terbesar di tingkat nasional dan internasional.

Ia menambahkan, program kerja IWAPI berfokus pada tiga hal, yaitu meningkatkan keahlian sumber daya manusia, membuka jaringan pemasaran seluas-luasnya dari segi marketing dan membuka serta mempermudah akses ke lembaga pembiayaan dari segi finansial.

"Mari kita kibarkan semangat inovatif, inklusif, dan kolaboratif untuk kemajuan perempuan pengusaha di Indonesia, dengan harapan membawa Indonesia semakin maju mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia menjadi berkekuatan ekonomi terdistribusi di dunia serta tercapainya net zero emission di tahun 2060," pungkasnya. ● **jay/gio**

# 8 | Nusantara



## OPERASI PASAR BERAS MEDIUM BANDUNG

Warga antre untuk membeli beras murah pada operasi pasar beras medium di Antapani, Bandung, Jawa Barat, Rabu (22/2). Pemerintah Kota Bandung bersama Bulog dan Bank Indonesia menyediakan beras medium murah sebanyak 20 ton beras per kecamatan dengan harga Rp8.500 per kilogram yang diharapkan dapat membantu masyarakat jelang bulan suci ramadan.

CEGAH KONFLIK PEMILU 2024

# Ketua DPRD Ingatkan Disdukcapil Soal Validasi Data Penduduk Kab. Bogor

Disdukcapil harus sesegera mungkin mengupgrade dan melakukan validasi data penduduk Kabupaten Bogor.

Karena tahun depan bangsa Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi, Pemilu 2024, kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.

**CIBINONG (IM)**- Guna mencegah potensi konflik pada Pemilu 2024 mendatang, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengingatkan Disdukcapil untuk simultan melakukan validasi data penduduk Kabupaten Bogor.

Rudy berpendapat, Disdukcapil merupakan organ pemerintahan dalam men-

gelola data kependudukan yang memiliki peran strategis terkait validasi data penduduk Kabupaten Bogor. Sebab, hajat demokrasi Pemilu 2024 erat berhubungan dengan data kependudukan untuk mencegah potensi konflik.

"Disdukcapil harus sesegera mungkin mengupgrade dan melakukan validasi data

penduduk Kabupaten Bogor. Karena tahun depan bangsa Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi, Pemilu 2024," ucap Rudy, Rabu (22/2).

Satu hal yang perlu menjadi perhatiannya yakni jumlah penduduk yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor. Data BPS menyebutkan, jumlah penduduk Bumi Tegar Beriman tidak sesuai dengan prediksi sebab bukan bertambah malah berkurang.

"Tahun 2021, penduduk Kabupaten Bogor berjumlah 5,9 juta jiwa, diprediksi tahun 2022 jumlahnya 6 juta jiwa, tapi berdasarkan hasil sensus penduduk, selesai covid-19 yang tadinya 5,9 juta jumlah penduduk Kabupaten Bogor saat ini 5,4 juta jiwa berarti

berkurang sekitar 500 ribu jiwa," sambungnya.

Rudy menuturkan, berkurangnya jumlah penduduk antara lain disebabkan migrasi. Banyak warga pendatang yang telah bertahun-tahun menjadi penghuni Kabupaten Bogor berpindah ke daerah lain karena kehilangan sumber pendapatan ekonomi.

Dia pun meminta penambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat urbanisasi ataupun migrasi harus dicermati secara utuh.

"Karena berkaitan dengan data pemilih. Nanti mereka dicatat sebagai pemilih di daerah mana, daerah pemilihan (Dapil) mana, atau dapil berapa," tutur Rudy.

Untuk itu, di tengah upaya KPU memvalidasi data pemilih,

Disdukcapil Kabupaten Bogor harus juga berperan aktif. Salah satunya terus melakukan upgrade data penduduk berdasarkan data asli dari lapangan atau tidak berdasarkan prediksi yang dilakukan Disdukcapil maupun BPS yang sample sensusnya diambil pada tahun-tahun sebelumnya.

"Pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah, di mana data Kependudukan menjadi salah satu hal yang wajib dalam menentukan jumlah pemilih setiap wilayah, sehingga dengan terapatnya data kependudukan hari ini, tentunya bisa meminimalisir terjadinya konflik pelaksanaan pemilu. Kalau datanya valid, pemilu bisa berjalan lancar, jujur, adil dan langsung umum bebas rahasia," tukasnya. ● **gio**

## Plt Bupati Bogor Ingatkan Jajarannya Target SDGs Terealisasi Tahun 2030

**BOGOR (IM)**- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memiliki instrumen dan sumberdaya untuk mengimplementasikan pembangunan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditargetkan terealisasi di tahun 2030.

Dengan target itu, Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengingatkan seluruh jajarannya untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan harus menyesuaikan dengan SDGs serta membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa.

Hal itu dikatakannya saat membuka acara bimbingan teknis sistem informasi pemerintah daerah. "Hari ini Kabupaten Bogor sudah harus menyusun kerangka terpadu berintegrasi SDGs untuk melihat hal-hal prioritas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bumi Tegar Beriman," tegas Iwan Setiawan.

Iwan menjelaskan, tujuan dari pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.

Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs sendiri merupakan komitmen secara global dan nasional.

Semenjak SDGs diterapkan, dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor itu sudah diimplementasikan, apa yang menjadi poin-poin di dalam SDGs yang terdiri dari 17 tujuan itu selalu menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah yang tidak terpisahkan.

Dalam hal ini Bappedalitbang Kabupaten Bogor bertugas mengawal bagaimana

implementasi program pada tiap-tiap perangkat daerah. Saya juga mengajak seluruh stakeholder bukan hanya dari pemerintah tetapi seluruh pemangku kepentingan untuk samsama mewujudkan tujuan SDGs di Kabupaten Bogor," ujar Iwan Setiawan.

Sedangkan, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Ir Suryanto Putra menjelaskan, SDGs ini tujuan yang harus dicapai bukan hanya oleh pemerintah tetapi seluruh stakeholder di daerah. "Mari kita sama-sama wujudkan apa yang menjadi tujuan utama dari SDGs ini, tentunya arah-arah pembangunan di Kabupaten Bogor sudah mengimplementasikan SDGs," tegasnya.

Seperti yang dikatakan Plt Bupati Bogor, pihaknya bertugas mengawal bagaimana implementasi di dalam program-program SKPD, sudah apa belum dengan SDGs. Tiap tahun kita evaluasi, apa yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana. "Hasil evaluasi itu yang akan menjadi arah untuk mencapai target di 2030 nanti. Bahkan juga sudah mengintegrasikan program SDGs sampai tingkat desa," papar Suryanto.

Ir Suryanto Putra juga menambahkan bahwa yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Bogor sejak

periode 2018-2023 dijalankan sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan yaitu berpedoman pada Pancakarsa.

"Boga Cerdas, Boga Sehat, Boga Maju, Boga Membangun dan Boga Berkeadilan. Itu semua merupakan janji dari Kepala Daerah yang terpilih untuk menuntaskan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor yang beririsan dengan SDGs," jelasnya.

Manager Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat SDGs, Kementerian PPN/Bappenas Setyo Budiantoro juga ikut bicara melalui virtual.

Dia mengatakan pada tingkat nasional juga terus berupaya mengintegrasikan SDGs dalam rencana pembangunan nasional. Setyo Budiantoro menekankan, jika kerjasama antar pihak dapat berjalan SDGs ini akan bisa dicapai. Dirinya juga melihat banyak progress yang baik di Kabupaten Bogor.

"Seperti soal stunting, air bersih, sanitasi, perumahan, kemudian pelayanan publik meningkat. Walaupun ada tantangan-tantangan yang cukup berat. Kuncinya untuk Kab. Bogor yaitu bagaimana mengoptimalkan kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah," ungkapnya. ● **gio**



Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Ir Suryanto Putra menjelaskan, SDGs.

## Petugas Sita Ratusan Botol Minol dari THM di Kota Bogor

**BOGOR (IM)**- Petugas gabungan dari TNI-Polri dan Satpol PP Kota Bogor, melakukan razia minuman beralkohol (minol) di sejumlah tempat hiburan malam (THM). Dari razia yang dilakukan pada Selasa (21/2) hingga Rabu (22/2) dini hari, petugas berhasil menyita ratusan botol minol golongan B dan C.

Kasat Reserse Narkoba Polresta Bogor Kota, Kompol Agus Susanto, menyebutkan, pihaknya menyita sebanyak 298 botol minol dari sembilan THM. Yakni dari kafe Zoom, Chale, X One, SLR, Cabin, Zentrum, Club 19, dan True Story di Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

"Dari sembilan tempat yang dirazia, kami berhasil mengamankan ada sekitar 298 minuman beralkohol berbagai macam merk. Baik itu lokal maupun luar negeri," kata Agus, Rabu (22/2).

Lebih lanjut, Agus menuturkan, petugas gabungan fokus merazia dan menyita minol dengan kadar alkohol di atas 5 persen. Sejumlah minol yang disita memiliki kadar alkohol sekitar 20 hingga 40 persen.

Agus menegaskan, penyitaan ini berdasarkan pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor Nomor 48 Tahun 2019, tentang

Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol di Kota Bogor. Dimana pengusaha di Kota Bogor dilarang untuk menjual minol golongan B dan C.

"Jadi sesuai ketentuan bahwa di Kota Bogor, minol golongan B dan C dilarang beredar. Sehingga, minol yang di atas 5 persen kita lakukan pe-

nyitaan dan tindakan lebih lanjut. Barang bukti kita amankan dan diserahkan ke Satpol PP," jelas Agus.

Di samping itu, lanjut dia, pihaknya akan terus melaksanakan operasi gabungan khususnya menjelang bulan Ramadhan. Diharapkan, razia minol ini dapat membantu situasi dan kondisi wilayah di Kota Bogor tetap kondusif.

"Sehingga, yang kami lakukan memberikan kenyamanan bagi warga Kota Bogor yang mau melaksanakan Ramadhan. Serta tidak terganggu dengan adanya peredaran minuman keras," tegasnya.

Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syach, mengatakan operasi ini akan rutin digencarkan. Guna mengantisipasi dan menjaga kondusifitas masyarakat.

Selain THM, kata Agustian, petugas gabungan juga akan terus melakukan pemantauan di toko kelontong yang kerap menjual minol golongan B dan C. Terutama yang menjual secara ilegal.

"Dan juga untuk memastikan para pelaku usaha hiburan di Kota Bogor tetap menaati pada peraturan yang ada di Kota Bogor terkait minol golongan B dan C," tegasnya.

Agustian mengatakan, pihaknya juga akan melihat aturan dari Peraturan Daerah (Perda) terkait, apabila di kemudian hari ditemukan minol di tempat yang sama. "Nanti kami lihat dari sisi Perdanya, apakah ada sanksi lain. Bisa misalkan penutupan sementara, penyegelan, dan pencabutan izin usaha," ujar Agustian. ● **gio**